

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TOLO SELATAN KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO

Oleh:
Akhmad
Universitas Pejuang Republik Indonesia

Abstrak

Upaya implementasi atau penerapan sistem manajemen dalam pelaksanaan fungsi organisasi secara menyeluruh, sudah merupakan kebutuhan dan sangat strategis dilaksanakan. Fungsi-fungsi manajemen itu sendiri telah banyak teruji dalam berbagai bentuk dan ragam organisasi moderen dewasa ini. Hal itu membuktikan pula bahwa penerapan secara sistematis fungsi perencanaan, dan melakukan pengorganisasian yang baik yang diikuti pelaksanaan dan pengawasan yang optimal, jelas akan memberikan hasil yang memuaskan bagi organisasi. Bagi pemerintah Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas adalah bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Kelurahan Tolo selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Sedangkan sampel dalam penelitian ini seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kelurahan di Kelurahan Tolo Selatan Kabupaten Jeneponto dilakukan secara sistem *bottom up planning* melalui pertemuan-pertemuan pada tingkat kelurahan dengan menerapkan perencanaan partisipatif masyarakat kelurahan. Hasil perencanaan tersebut kemudian diusulkan ke pemerintah tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pembangunan kelurahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama dengan masyarakat kelurahan, dan pelaksanaan pembangunan kelurahan. Pelaksanaan pembangunan ditujukan kepada tiga aspek yaitu pembangunan bidang prasarana dan sarana jalan, pembangunan perekonomian dan pembangunan bidang sosial. Hasil pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mampu berjalan sekitar 50 % dari rencana yang diusulkan. Pelaksana proyek pembangunan kelurahan tersebut melalui Cabang Dinas Otonom dan Departemen yang ada di Kecamatan.

Kata kunci: Sistem manajemen; Pembangunan.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan itu dimaksudkan agar supaya segala apa yang dilakukan dalam pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan, pihak pemerintah dengan segala upaya memanfaatkan potensi daerah guna membiayai pembangunan. Kendatipun demikian, perlu adanya kepemimpinan yang baik dari pihak pemerintah dalam hal ini apararat pelaksana pembangunan, sebab kepemimpinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain kepemimpinan pemerintah pada semua tingkat pemerintah mempunyai posisi yang strategis dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan Kelurahan mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kelurahan yang terdiri atas berbagai sektor. Program pembangunan tersebut saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah dengan berbagai departemen dan non departemen di daerah sesuai dengan batas pokok serta tanggung jawab masing-masing.

Dalam realisasi fisiknya pembangunan Kelurahan justru bersifat menyeluruh, tersebar luas ke seluruh pelosok Kelurahan. Pembangunan Kelurahan juga menggali segala potensi dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang berusaha memadukan arah pembangunan sektoral dan regional dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada dasarnya menghendaki suatu kegiatan yang berjalan efisien dan efektif, yaitu upaya mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sehemat mungkin.

Kelurahan Tolo selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, yang merupakan unit pemerintahan terendah di bawah Camat dalam wilayah otonomi daerah Kabupaten Jeneponto. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak bisa dilepaskan dari mekanisme kerja dengan melibatkan fungsi-fungsi manajemen di dalamnya.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut masih kurang optimal, bahkan beberapa fungsi manajemen diantaranya masih kurang jelas implementasinya. Salah satu contohnya adalah fungsi perencanaan dan fungsi penggerakan terutama dari segi motivasi kerja aparatur pemerintah kelurahan. Hal ini lebih disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh program-program kerja yang diterima oleh Pemerintah Kelurahan dari pemerintah tingkat atasnya, sebagai bagian dari mekanisme kerja masa lampau yang menempatkan pemerintah Kelurahan yang melaksanakan fungsi dan program-program pemerintah secara *top down planning*.

Upaya implementasi atau penerapan sistem manajemen dalam pelaksanaan fungsi organisasi secara menyeluruh, sudah merupakan kebutuhan dan sangat strategis dilaksanakan. Mengingat fungsi-fungsi manajemen itu sendiri telah banyak teruji dalam berbagai bentuk dan ragam organisasi moderen dewasa ini dan membuktikan pula bahwa penerapan secara sistematis fungsi perencanaan, dan melakukan pengorganisasian yang baik yang diikuti pelaksanaan dan pengawasan yang optimal, jelas akan memberikan hasil yang memuaskan bagi organisasi. Bagi pemerintah Kelurahan Tolo selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas adalah bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Berdasar pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu bagaimana implementasi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan di Kelurahan Tolo selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto?.

TINJAUAN TEORI

Dalam memberikan pengertian tentang pemerintah kelurahan, disini penulis akan memisahkan pengertian Pemerintah dan Pengertian Kelurahan itu sendiri sehingga dapat diperoleh pengertian yang lebih jelas dari kedua kata tersebut. Jika diadakan pendekatan dari segi bahasa kata “Pemerintah dan Pemerintahan” ternyata bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku kata “Perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “Perintah” yaitu:

1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah.
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Di dalam bahasa Inggris Pemerintah atau Pemerintahan tidak ada perbedaan yaitu disebut “*Government*”. Oleh Bayu Surianingrat mengartikan “*Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan*”. Sedangkan pengertian Pemerintah secara terminologi sebagai berikut:

“Pemerintah adalah organ atau badan yang menjalankan tugas-tugas atau fungsi dari pada negara, sedangkan pemerintahan adalah segala aktivitas dan kegiatan yang dijalankan oleh organ atau badan yang disebut pemerintah”

Dengan demikian maka kata pemerintah dan pemerintahan tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Pemerintah merupakan suatu organisasi atau wadah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dan pemerintahan berarti suatu kegiatan yang mengatur dan mengurus tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Sedangkan pengertian kelurahan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dikatakan:

“Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Dari pengertian kelurahan tersebut tadi di atas terlihat adanya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sebagai suatu wilayah dalam arti teritori.
2. Ditempati oleh sejumlah penduduk.
3. Mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.
4. Tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dengan kutipan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Kelurahan adalah subwilayah administratif kecamatan dengan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat. Namun, tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dan bukanlah berarti bahwa tidak ada kegiatan pemerintahan melainkan dimaksud tidak berhak mengatur. Dalam arti membuat kebijaksanaan terutama yang berkaitan dengan pembebasan kepada masyarakat seperti pajak, dan

retribusi. Dengan adanya pengertian tentang pemerintah dan pengertian mengenai kelurahan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian mengenai pemerintah kelurahan adalah suatu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi yang terkecil dan terendah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah kecamatan.

Implementasi

Bintoro Tjokroamidjojo (1986:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah berarti pelaksanaan kegiatan berdasarkan ide-ide dan program yang telah disusun sebelumnya. Implementasi ini berkaitan dengan penggunaan biaya, penggunaan anggaran serta proses-proses yang berkaitan dengan penggerakan dan pengarahan semua fungsi-fungsi yang telah disusun.

Pengelolaan pembangunan adalah dimaksudkan terselenggaranya perubahan-perubahan tersebut dalam keadaan yang stabil dinamis. Dan menurut Bintoro pengelolaan tersebut harus dilakukan secara berencana melalui suatu proses politik dan proses administrasi, yang meliputi:

1. Adanya keinginan-keinginan dasar dalam masyarakat yang menuntut pemuasan. Sumber-sumber dari keinginan-keinginan ini adalah kebutuhan dasar yang dirasakan (*felt needs*), dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang diperlukan karena kondisi obyektif (*real needs*).
2. Perumusan konsultasi tersebut di atas dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan politik mengenai kehendak negara/ daerah. Dalam keputusan politik ini ditetapkan apa yang hendak dibangun dan dasar-dasar dari cara pencapaiannya. Tingkat ini disebut juga sebagai tingkat formulasi keputusan politik (*formulasi of political decision*).
3. Perumusan dasar-dasar hukum bagi pelaksanaan politik tersebut di atas, dimaksudkan supaya kegiatan-kegiatan lanjutan tetap dilaksanakan berdasar kerangka hukum yang ada (*legal context*). Tingkat ini disebut sebagai tingkat legalisasi (*legalisation*).
4. Perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan politik. Kebijaksanaan dan program tersebut dituangkan dalam suatu rencana kebijaksanaan pembangunan atau merupakan suatu rangkaian kebijaksanaan dan program yang konsisten.
5. Penyusunan program-program kerja, sistem dan mekanisme pelaksanaannya (*Programming*).
6. Kemudian tingkat implementasi, tingkat ini dimaksudkan untuk merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.
7. Penilaian dari pada pelaksanaan maupun dari hasil-hasil yang dicapai.

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada akhirnya bermuara pada upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, disamping pada tanggungjawab, akuntabilitas dan realibilitas pemerintahan yang menuju kepada pemerintahan yang bertanggung jawab, dapat diandalkan serta

memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat secara lebih efektif dan mampu mengantisipasi perkembangan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Manajemen

Mengenai istilah manajemen di Indonesia terdapat beberapa pengertian, mulai penegetian secara etimologi, di mana manajemen dipahami sebagai kegiatan menggerakkan (to manage), yang oleh Prajudi disebut sebagai hakekat manajemen. Dan inti dari menggerakkan ini adalah manusia dan segala sumber daya yang dimilikinya. Istilah manajemen dari Bahasa Inggris, yaitu management yang diterjemahkan sebagai pengelolaan di mana berarti seluruh proses kegiatan usaha mencapai tujuan dari orang-orang yang ada dalam organisasi yang digerakkan oleh suatu komando yang disebut dengan manajer.

Leonard D White dalam A.W. Widjaja (1986:8), mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok baik usaha pemerintah atau swasta, sipil atau militer baik secara besar-besaran ataupun secara kecilkecilan. Menurut George R. Terry dalam bukunya "*Principles of Managament*", yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat (1988:20) mengemukakan bahwa:

"Manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya".

Dari defenisi yang disebutkan tadi menggambarkan bahwa manajemen pada dasarnya adalah suatu proses mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan sampai pada pengawasan. Selanjutnya, menurut Siagian (1971:22) mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Dari kedua defnisi di atas yang dikemukakan penulis tentang manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pada dasarnya adalah:

1. Suatu proses kegiatan kelompok secara teratur.
2. Untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Proses terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Menggunakan/melibatkan sumber-sumber manusia maupun sumber daya lainnya.

Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan, mengembangkan serta memperbaiki keadaan yang lebih baik. Menurut Siagian (1982:3) mengatakan bahwa:

"Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah, menuju

modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.

Sedangkan Michael P. Todaro (1983:9) mengatakan sebagai berikut:

“Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan peningkatan dalam pertumbuhan GNP perkapita sebagai indeks dari pembangunan. Akan tetapi pembangunan merupakan suatu proses multi dimensi yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterahkan kehidupan masyarakat”.

Pembangunan masyarakat Kelurahan menurut catatan Resmi Pola Gerak Operasional Pembangunan Kelurahan (SK Menteri No.42 Tahun 1969) disebutkan sebagai berikut:

“Pembangunan Kelurahan adalah pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan terendah yang harus dilaksanakan dan dibina secara terus menerus secara sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh”.

PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di di Kelurahan Tolo selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Tipe penelitian ini adalah deskriptip, yaitu berusaha menggambarkan secara umum mengenai implementasi sistem manajemen dalam organisasi Pemerintah Kelurahan Tolo selatan. Pada penelitian ini menggunakan seluruh jumlah populasi seluruh pegawai yang ada pada Kelurahan Tolo selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Adapun Sampel dalam penelitian ini sebagian dari populasi yang menjadi sasaran penelitian. Dan sampel dalam penelitian ini seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan Tolo selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu implementasi system manajemen dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan Tolo selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu penelitian dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap sasaran penelitian.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara, terutama kepada informasi yang merupakan sampel penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu penelaahan terhadap dokumen dan catatan mengenai pengelolaan data dan informasi manajemen.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Tentang perencanaan ini, maka dilakukan penelitian pada responden mengenai penerapan sistem dan metode perencanaan dalam proyek bantuan pembangunan kelurahan di Kelurahan Tolo selatan Kabupaten Jeneponto.

Tabel 1
Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Pembangunan Kelurahan di Kelurahan Tolo selatan Kabupaten Jeneponto

No.	Jenis tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat realistis	-	-
2.	Realistis	56	62,22
3.	Kurang realistis	34	37,78
4.	Tidak realistis	-	-
	Jumlah	90	100,000

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020.

Berdasar pada tabel 1 di atas, maka dapat dilihat bahwa perencanaan pembangunan kelurahan di Kelurahan Tolo selatan Kabupaten Jeneponto, ternyata dinilai oleh responden masih berjalan relatif realistis. Artinya bahwa apa yang direncanakan tersebut dapat memberikan harapan untuk mencapainya serta melaksanakannya karena sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat kelurahan dan ada kemampuan dari segi pembiayaan, meskipun demikian ada sebagian responden melihat bahwa rencanarencana pembangunan kelurahan yang ada tersebut masih kurang realistis.

Makna realistis dalam penelitian ini adalah bahwa susunan rencana pembangunan kelurahan yang ada tersebut baik dari kemampuan pembiayaan maupun saaran yang akan dicapai dari perencanaan tersebut belum sesuai dengan harapan-harapan masyarakat kelurahan secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap, ternyata umumnya rencana pembangunan kelurahan tersebut dikelompokkan sebagai berikut: 1) Rencana pembangunan prasarana dan sarana perhubungan; 2) Rencana pembangunan prasarana dan sarana ekonomi; 3) Rencana pembangunan prasarana Sosial.

Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kelurahan

Rencana pembangunan kelurahan yang telah disetujui untuk dilaksanakan pada Kecamatan, umumnya dilaksanakan melalui pembangunan. terpadu Kecamatan, seperti pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan antara kelurahan dalam wilayah Kecamatan itu sendiri, dan pembangunan sarana perekonomian untuk keperluan masyarakat kelurahan dalam wilayah Kelurahan Tolo selatan Kabupaten Jeneponto, baik dalam kerangka pemeliharaannya maupun pembangunan fasilitas baru.

Tabel 2
Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Tolo selatan

No.	Jenis tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Berjalan dengan baik	27	30,00
2.	Cukup baik	43	47,78
3.	Kurang	20	22,22

4.	Tidak memadai	-	-
	Jumlah	90	100,000

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020.

Dengan demikian menurut responden pelaksanaan proyek bantuan pembangunan kelurahan di Kelurahan Tolo selatan berjalan dengan relatif cukup baik, dalam arti bahwa setelah proyek-proyek bantuan pembangunan kelurahan tersebut telah disetujui beserta dengan alokasi anggarannya, maka segera dilaksanakan berdasarkan target waktu dan target biaya yang telah ditetapkan melalui persetujuan anggaran proyek pembangunan kelurahan.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap, maka diperoleh hasil observasi bahwa hasil-hasil pembangunan berdasarkan program pembangunan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena program-program tersebut hanya mampu dilaksanakan sekitar 50 % dari program-program yang ada.

Fungsi Pengawasan

Salah satu tahapan yang paling akhir dalam suatu proses manajemen pembangunan kelurahan adalah pelaksanaan pengendalian atau pengawasan. Kegiatan pengawasan adalah dimaksudkan untuk menjaga agar seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, meskipun demikian suatu tindakan pengawasan bukan berarti dimaksudkan untuk mencari kesalahan dari bawahan, akan tetapi lebih ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap kendalakendala yang ditemukan di lapangan.

Tabel 3
 Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pengawasan
 Dalam Pengelolaan Pembangunan
 Di Kelurahan Tolo selatan

No.	Jenis tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Pengawasan ketat	25	27,78
2.	Cukup ketat	45	50,00
3.	Kurang ketat	13	14,44
4.	Tidak ada pengawasan	7	7,78
	Jumlah	90	100,000

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020.

Berdasar pada pengertian tersebut di atas, maka pelaksanaan fungsi pengawasan ternyata menurut responden berjalan dengan cukup ketat, dalam arti bahwa pimpinan melakukan upaya-upaya pengendalian secara ketat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan pembangunan,

terutama dimaksudkan untuk menjaga agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan kebijaksanaan dan rencana yang telah disusun.

Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan cukup ketat dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, namun dalam pelaksanaan proyek bantuan pembangunan kelurahan tersebut, masih sering dijumpai penyelesaian-penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan rencana, baik dalam waktu penyelesaiannya maupun dari segi ketepatan waktu pelaporannya, sehingga dapat menyebabkan mekanisme dalam pengendalian dan evaluasi dari hasil-hasil pembangunan kelurahan di Kelurahan Tolo selatan .

KESIMPULAN

1. Perencanaan pembangunan kelurahan di Kelurahan Tolo selatan Kabupaten Jeneponto dilakukan secara sistem *bottom up planning* melalui pertemuan-pertemuan pada tingkat kelurahan dengan menerapkan perencanaan partisipatif masyarakat kelurahan. Hasil perencanaan tersebut kemudian diusulkan ke pemerintah tingkat atasnya, Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Pelaksanaan pembangunan kelurahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama dengan masyarakat kelurahan, dan pelaksanaan pembangunan kelurahan, terutama ditujukan kepada tiga aspek yaitu pembangunan bidang prasarana dan sarana jalan, pembangunan perekonomian dan pembangunan bidang sosial. Hasil pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mampu berjalan sekitar 50% dari rencana yang diusulkan. Pelaksana proyek pembangunan kelurahan tersebut melalui Cabang Dinas Otonom dan Departemen yang ada di Kecamatan.
3. Pelaksanaan pengawasan proyek bantuan pembangunan kelurahan ternyata mendapat pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah Kecamatan itu sendiri, terutama dari segi ketepatan pelaksanaannya dan ketepatan dalam penyampaian laporannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Tjokroamidjojo. 1981. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1987. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- _____. dan Mustopodidjo A.R. 1983. *Teori dan Strategi Pembangunan Alasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Coralie Bryant dan G White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Dirjen PMD. *Naskah Persetujuan P3AM No.4/4.241185/SET Tanggal 10 Juni 1996*. Jakarta.
- Handyaningrat Sowarno. 1989. *Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Imam Soeharto. 1999. *Manajemen Proyek*. Jakarta: Erlangga.
- Kaho, Riwu Josef. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, CST. 1983. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Michael, P. Todaro. 1983. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Nyoman, Beratha. 1981. *Kelurahan Masyarakat Kelurahan dan Pembangunan Kelurahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pasaribu dan B. Simajuntak. 1993. *Pembangunan Masyarakat Kelurahan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang *Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan di Daerah*.

Siagian, S.P. 1982. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Suryaningrat, bayu. 1980. *Kelurahan dan Kelurahan*. Jakarta: Metro Pos.

Surat Keputusan No. 42 Tahun 1969 (Mendagri) tentang *Pembangunan Masyarakat Kelurahan menurut Cattan Resmi Pola Gerak Operasional Pembangunan Kelurahan*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.